

BAB 3
DARI PENOLAKAN SAMPAI PENERIMAAN: DINAMIKA FORKOM UI
DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN SMPT (SK.0457)

3.1 Kondisi Umum Lembaga Kemahasiswaan di UI: Pasca Pembekuan Dewan Mahasiswa Sampai Terbentuknya Forkom UI

Setelah melihat perkembangan NKK/BKK yang diterapkan sejak 1978 yang berimbas pada pembekuan organisasi tingkat universitas (Dema), membuat aksi-aksi mahasiswa relatif. Kondisi ini membuat para aktivis mahasiswa merasa tidak puas terhadap NKK/BKK karena kebijakan ini dianggap membatasi kegiatan politik mereka dan hanya bergerak di bidang penalaran, olah raga, dan kesenian. Mereka menganggap NKK/BKK tidak sesuai bagi mereka, apa lagi penyelenggara NKK berada di bawah kontrol langsung pimpinan perguruan tinggi (BKK).

Menyikapi keadaan tersebut, mahasiswa membuat pertemuan di Jakarta pada 28 April 1979. Hasilnya, mereka ingin mempertahankan Dema beserta AD/ART Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI sebagaimana yang telah dibentuk pada 25 November 1966 melalui Musyawarah Kerja Mahasiswa Se-UI di Ciloto. IKM UI merupakan “student government” atau pemerintahan mahasiswa yang mengacu pada konsep negara, yaitu ada rakyat (mahasiswa), legislatif sekaligus yudikatif (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa/MPM), dan eksekutif (Dema).⁵⁶ IKM UI atau “student government” inilah yang kemudian menjadi wadah yang mengatur kegiatan-kegiatan mahasiswa dari, oleh, dan untuk mahasiswa sendiri.

Deklarasi mahasiswa untuk tetap berpegang pada IKM dan Dema ini membuat pimpinan UI bereaksi. Pada tahun 1981, ketika Peter Sumaryoto terpilih sebagai Ketua Dema UI, Rektor UI Nugroho Notosusanto⁵⁷ meminta Peter mundur atau status kemahasiswaannya dipecat. Namun Peter tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan Dema UI sehingga pada 29 Maret 1982 statusnya sebagai mahasiswa UI dicabut. Rektor kemudian menginstruksikan para

⁵⁶ Wawancara Merdias Almatsier (Purek III UI periode 1986 - 1994) pada 16 Maret 2009. Lihat juga *Majalah SUMA UI edisi No. 11, Tahun V, 1996*.

⁵⁷ Rektor UI periode tahun 1981 – 1986.

Dekan untuk menindak tegas aktivis Dema yang masih menggunakan IKM atau Dema sebagai organisasi kemahasiswaan karena IKM dan Dema sudah dibubarkan sejak 1978. Setelah itu, akibat kaderisasi yang tidak terang-terangan serta kebijakan NKK/BKK yang meniadakan organisasi mahasiswa tingkat universitas, akhirnya membuat mahasiswa mulai melupakan Dema.⁵⁸

Terhadap dunia kemahasiswaan di UI pada periode awal 1980-an, Nugroho Notosusanto kemudian menerapkan konsep Wawasan Almamater (institusionalisasi dan profesionalisasi, melalui transpolitikasi), yang meski dikatakan tidak sama dengan depolitisasi, esensinya adalah mahasiswa tidak bisa lagi menggunakan kampus sebagai basis kegiatan politik.⁵⁹ Pada masa ini pula Nugroho mendirikan beberapa UKM sebagai wadah aktivitas mahasiswa UI, misalnya UKM *Marching Band Madah Bahana*, Kelompok Studi Mahasiswa *Eka Prasetya*, dan lain-lain.

Mahasiswa kian tergiring ke jalur akademik tatkala diterapkan batas waktu perkuliahan yang singkat 6 – 7 tahun, serta diterapkannya satuan kredit semester (SKS) dan indeks prestasi (IP), sebagai tolok ukur keberhasilan seorang mahasiswa dalam menempuh perkuliahan. Dampaknya, kegiatan intra dan ekstra-kampus tidak mencapai harapan secara optimal. Bagi para aktivis, membagi waktu antara kuliah dan berorganisasi sama juga mempertaruhkan hidup dan matinya kepedulian mereka terhadap dunia di luar kampus, terutama masyarakat. Hal ini disebabkan mahasiswa 1980-an mendengar rekan aktivisnya tersendat kuliahnya yang berdampak pada keputusan *drop-out* atau meninggalkan organisasi.

Pada masa NKK, memang masih ada organisasi mahasiswa intra-kampus di lingkungan UI meskipun hanya sebatas di tingkat fakultas, yakni Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa (SMF dan BPMF). Namun, masing-masing SMF-BPMF ini berjalan sendiri-sendiri serta mulai terkotak-kotak pada fakultas sehingga melemahkan integritas mahasiswa UI. Tidak terjadi interaksi antar fakultas dengan fakultas lainnya serta ditambah kondisi mahasiswa UI yang semakin apatis.

⁵⁸ Wawancara dengan Merdias Almastier (tanggal 12 Maret 2009)

⁵⁹ Nugroho Notosusanto. *Menegakkan Wawasan Almamater*. Jakarta: UI Press., 1984. hlm. 23.

Kondisi ini tentunya menimbulkan kegemasan di beberapa kalangan aktivis mahasiswa intra-kampus melihat lembaga kemahasiswaan yang dianggap “adem ayem”. Padahal waktu itu, berbagai kegiatan ekstra-kampus seperti kelompok studi dan komite aksi lebih dominan dalam gerakan mahasiswa, terutama aksi-aksi mereka dalam menyikapi kasus penggusuran, korupsi, dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat.⁶⁰ Organisasi intra-kampus dipandang terlalu lamban dalam merespon isu-isu dan gejolak di luar kampus.

Hal itulah yang membuat beberapa ketua SM-BPMF mulai merintis pertemuan untuk menanggulangi masalah yang mengancam integritas mahasiswa UI.⁶¹ Dalam pertemuan-pertemuan tersebut mereka sering mengundang beberapa mantan tokoh mahasiswa seperti Emil Salim, Arbi Sanit, dan lain-lain untuk berbagi pengalaman sekaligus memberi masukan terhadap gerakan mahasiswa.

Kevakuman kegiatan mahasiswa juga ternyata dirasakan oleh pihak Rektorat. Setelah pergantian Rektor UI dari Nugroho Notosusanto kepada Sujudi, pihak rektorat melalui Purek III Merdias Almatsier mengumpulkan para ketua SM dan BPMF di Balai Mahasiswa Kampus UI Salemba pada Februari 1986. Alasan pihak rektorat mengumpulkan para ketua SM/BPMF karena ingin mendengar langsung aspirasi dari mahasiswa. Pada saat itu Rektorat memandang kreativitas mahasiswa perlu digairahkan kembali dengan salah satunya mengurangi tekanan keras pimpinan universitas terhadap mahasiswa. Selain itu, BKK yang dibentuk sebagai penyelenggara kegiatan mahasiswa di tingkat universitas tidak berfungsi sebagai mana mestinya sehingga pihak rektorat mengalami kesulitan dalam hal koordinasi.⁶²

Dalam pertemuan antara mahasiswa dengan rektorat pada Februari 1986 itu, mahasiswa merasakan perlu diadakannya:⁶³

- 1) Lembaga kemahasiswaan yang mewedahi kepentingan dan gerakan mahasiswa di tingkat universitas.

⁶⁰ Lihat Satrio Arismunandar. *Bergerak! 2*. Yogyakarta: Genta Press, 2005., hlm. 121 – 123

⁶¹ Wawancara dengan Kholid Novianto (Ketua BPM FSUI 1990 - 1991), pada 11 November 2008.

⁶² Wawancara dengan Merdias Almatsier (12 Maret 2009).

⁶³ Penjelasan mengenai berbagai aspirasi mahasiswa ini dihimpun berdasarkan wawancara dengan Eep Saefullah Fatah (12 November 2009), Andrinof Chaniago (5 Desember 2008), dan Merdias Almatsier (12 Maret 2009)

- 2) Lembaga kemahasiswaan yang mencerminkan aspirasi mahasiswa yang di dalamnya tercakup *student interest* (minat mahasiswa), *student welfare* (kesejahteraan mahasiswa), dan *social control* (control sosial).
- 3) Lembaga kemahasiswaan yang otonom dan independen (bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar).

Keputusan tersebut disepakati dan ditandatangani oleh 10 SM/BPMF se-UI yang hadir dalam pertemuan, di antaranya FT, FS, FPsi, FISIP (FIS), FE, FH, FE ext, FK, FKG, FMIPA (FIPIA), Purek III dan beberapa wakil dari Pudek. Pada saat itu juga ditentukan nama yang cocok untuk lembaga kemahasiswaan yang hendak dibentuk, sekaligus diadakan pemilihan calon-calon yang akan duduk sebagai koordinator. Akhirnya semua yang hadir dalam rapat tersebut menyetujui jika nama lembaga itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa UI (Forkom UI). Mereka menyepakati Forkom karena nama tersebut mengandung ikatan yang tidak terlalu kaku serta bersifat koordinasi.⁶⁴

Dalam pertemuan itu juga dilakukan pemilihan seorang koordinator untuk memimpin Forkom UI. Peserta sepakat menunjuk Himawan (FK 1983) yang ketika itu menjabat Ketua SM FK periode 1986 – 1987 sebagai Koordinator Forkom UI. Selanjutnya Himawan digantikan oleh Indra Surya (Ketua SM FH 1987 – 1988) sebagai Koordinator Forkom berikutnya.⁶⁵

Namun demikian, sebenarnya cikal bakal Forkom UI juga pernah dicetuskan oleh Imam B. Prasajo (Ketua SM FISIP 1983 – 1984) pada tahun 1983 dengan nama Ikatan SMF se-UI dan belum beranggotakan BPM-BPM. Akan tetapi, mengingat daya kontrol aparat BKK amat dominan dan kebijakan Rektor Nugroho Notosusanto yang dikenal keras terhadap gerakan mahasiswa, sehingga strategi yang dilakukan masih dalam bentuk peletakan fondasi, konsolidasi, sambil menyusun kekuatan dan memperkenalkan identitas pada mahasiswa.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Wawancara dengan Merdias Almatsier (Purek III UI) 16 Maret 2009

⁶⁶ Andrinof Chaniago (Ketua SM 1987 – 1988) dan Wawancara dengan Ali Anwar (Pengurus SM UII 1986 dan aktivis KMS UI), pada 15 Februari 2009.

3.2 Aktivitas Forkom UI Sebelum Terbitnya SK.0457/1990

Kehadiran Forkom UI selain sebagai reaksi atas kondisi kemahasiswaan yang mengalami kevakuman, sebenarnya juga didasari atas kerinduan mereka terhadap *student government* (pemerintahan mahasiswa)⁶⁷, terutama ‘kemenangan’ Dema dalam sejumlah aksi di pentas politik nasional (1966 – 1978). Mereka masih dibayangi oleh ‘kemenangan gerakan mahasiswa’ tahun 1966 yang dapat menggulingkan rezim yang berkuasa.⁶⁸ Menurut pandangan mahasiswa, untuk menguatkan kembali integrasi gerakan mahasiswa UI maka dibutuhkan lembaga pemersatu tingkat universitas seperti Dema.

Beberapa aktivis mahasiswa 1980-an melihat berdirinya Dema merupakan bentuk kesadaran mahasiswa untuk bersatu. Kerinduan ini yang kemudian memperkuat semangat mereka untuk membentuk suatu kelompok yang kemudian dikenal dengan Forkom UI. Mereka menyadari jika tetap mempertahankan nama Dema dalam organisasinya, maka pimpinan universitas tidak segan-segan akan memecat status kemahasiswaannya seperti yang dialami oleh Peter Sumaryoto. Semangat tersebut kemudian dituangkan dalam empat tujuan pembentukan Forkom UI, yaitu:⁶⁹

- 1) Mewujudkan suatu ikatan antar-lembaga mahasiswa di tingkat fakultas (SM dan BPM) yang sejak pemberlakuan NKK/NBKK, lembaga ini tidak terkoordinasikan dengan baik karena dihapuskannya lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas (Dema).
- 2) Mewadahi kegiatan dan aspirasi mahasiswa di tingkat universitas
- 3) Menjadi badan penghubung antara mahasiswa dengan pihak universitas
- 4) Sebagai sarana berdiskusi untuk membicarakan masalah-masalah kemahasiswaan dan kemasyarakatan.

⁶⁷ *Student Government* yang dimaksud merujuk pada lembaga-lembaga kemahasiswaan seperti: (1) Dewan Mahasiswa dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang merupakan lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat universitas, dan (2) Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa, lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas. Memang yang dibubarkan Pangkopkamtib Sudomo adalah Dewan Mahasiswa (Dema)

⁶⁸ Wawancara dengan Kholid Novianto (11 November 2008) dan Eep Saefullah (Koordinator Forkom 1990 – 1991), pada 12 November 2008.

⁶⁹ *Ibid.*, Kholid Novianto dan Eep Saefullah. Lihat juga Wawancara Chandra M. Hamzah (Ketua SM UI Pertama/ 1992 – 1993) dan Bagus Hendraning (Ketua SM UI 1993 – 1994) yang dimuat di *Majalah SUMA UI No. 13, Tahun VI, 1997.*, hlm. 11 – 13, dan hlm. 20 – 21.

Berbeda dengan organisasi Dema yang memiliki struktur dan AD/ART yang baku, Forkom UI lebih bersifat informal karena wadah ini hanya sebatas forum komunikasi tanpa ada aturan yang mengikat seperti struktur organisasi yang resmi. Sebenarnya AD/ART Forkom UI sudah dirancang pada masa Eep Saefullah menjabat sebagai koordinator, akan tetapi dokumen tersebut hilang. Keanggotaan Forkom UI juga bersifat terbatas karena hanya terdiri dari para ketua atau utusan SM dan BPM fakultas. Struktur keorganisasiannya pun sangat sederhana dan longgar, mengingat hanya ada seorang koordinator sebagai pemimpin forum dan selebihnya bertindak sebagai anggota. Koordinator bertugas memimpin sidang atau memfasilitasi pertemuan-pertemuan Forkom UI, serta berhubungan dengan pihak luar seperti pimpinan universitas dan pemerintah.⁷⁰

Posisi resmi Forkom di UI sebelum tahun 1990 sebenarnya telah mendapat pengakuan dari rektorat, walaupun Forkom UI belum banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan rektorat kecuali kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Memasuki tahun 1990, keterlibatan Forkom UI dalam pembahasan SK 0457 dengan pimpinan universitas semakin menguatkan posisi tawar Forkom UI di hadapan rektorat. Bagaimanapun pimpinan UI menginginkan SK 0457 harus mendapatkan legalitas dari semua lembaga kemahasiswaan se-UI, dan hal itu lebih efektif jika melibatkan Forkom.⁷¹ Keterlibatan lain ditandai dengan undangan pertemuan dari pimpinan UI yang ditujukan kepada Koordinator Forkom UI serta pelibatan Forkom UI dalam kegiatan seremonial universitas.

Mengenai sekretariat, Forkom UI tidak memiliki ruangan khusus, melainkan berpindah-pindah dari fakultas ke fakultas. Sekretariat Forkom UI biasanya lebih sering menggunakan sekretariat SMF di mana koordinatornya menjabat sebagai Ketua SMF bersangkutan. Forkom UI lebih banyak mengadakan pertemuan internal di FISIP UI karena selama dua periode koordinatornya adalah ketua SM yang berasal dari FISIP UI, misalnya Andrinof dan Eep Saefullah.

Sejak Forkom UI berdiri tahun 1986 – 1992, tercatat beberapa koordinator yang pernah menjabat, di antaranya Himawan (1986 – 1987), Indra Surya (1987 – 1988), Andrinof Chaniago (1988 – 1989), Eep Saefullah Fatah (1990 – 1991), dan

⁷⁰ Wawancara dengan Eep Saefullah (Koordinator Forkom 1990 – 1991), pada 12 November 2008.

⁷¹ Wawancara dengan Merdias Almatsier (16 Maret 2009) dan Eep Saefullah Fatah (12 November 2008).

Ahmad Fikri (1991 – 1992). Sedangkan mengenai koordinator Forkom UI yang menjabat pada tahun 1989 – 1990, tidak diketahui dengan jelas. Namun berdasarkan data yang penulis temukan dari hasil wawancara dengan Eep Saefullah dan Andrinof, pada periode tersebut Forkom UI mengalami kevakuman. Mereka mulai jarang mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi di kampus maupun persoalan masyarakat.⁷²

Pada periode 1989 – 1990 awal, pertemuan antar Ketua SM/BPMF ini tidak ada yang luar biasa karena tidak selalu membicarakan isu-isu penting, tetapi sekadar berbincang mengenai topik keseharian mereka. Pertemuan Forkom UI mulai terlihat dinamis dan intensif sejak munculnya SK Mendikbud No. 0457 tahun 1990. Aktivistis Forkom UI sesudah generasi Andrinof (1988 – 1990), yakni seperti Eep Saefullah Fatah (SM FISIP), Ferlita Sari (SM FPsi), Haris (SM FH), Munir (BPM FT), Ahmad Syarofi (SM FS), banyak terlibat dalam penyikapan SK No. 0457 sampai perumusan konsep SMPT UI.

Saat itu, di antara para aktivis Forkom UI yang cukup menonjol adalah Andrinof dan Eep Saefullah. Andrinof dan Eep sama-sama aktivis pemikir di UI pada era 1980-an. Keduanya sama-sama dari jurusan ilmu politik FISIP UI. Bisa dikatakan, Andrinof adalah seniornya Eep saat itu. Dalam beberapa kesempatan, jika Andrinof tidak hadir saat diundang dalam sebuah diskusi, Eep yang diminta untuk mewakilinya. Sebagai contoh, ketika kegiatan Temu Ramah pertama UI dengan Gubernur DKI Jakarta Wijogo Atmodarminto yang diadakan KSM UI pada 5 Maret 1990, Andrinof menyatakan tidak bisa hadir. Sebagai penggantinya, Andrinof merekomendasikan Eep sebagai pembicara.⁷³

Sepanjang tahun 1988 – 1990, kegiatan Forkom UI yang utama sebenarnya melakukan pertemuan-pertemuan antar-ketua SM-BPMF untuk membahas berbagai hal. Permasalahan yang dibahas biasanya seputar isu-isu yang berkembang di fakultasnya masing-masing. Forkom UI juga sering mengadakan kegiatan diskusi baik yang diadakan di kalangan anggota Forkom UI maupun yang sifatnya terbuka untuk umum.

⁷² *Ibid.*, keterangan serupa diperoleh dari wawancara dengan Eep Saefullah Fatah (12 November 2009)

⁷³ Wawancara tertulis dengan Ali Anwar pada 15 Februari 2009.

Kegiatan diskusi internal yang diadakan Forkom UI biasanya mengulas pemikiran tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Soekarno, Pramudya Ananta Toer, dan masalah-masalah yang sedang hangat di masyarakat. Forkom UI juga sering mengadakan kegiatan diskusi di kampus dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Adnan Buyung Nasution. Selain itu, Forkom UI juga pernah mengundang Pramudya Ananta dan W.S. Rendra tetapi dicekal karena keduanya dianggap dapat memprovokasi mahasiswa dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah.⁷⁴

Tidak hanya dalam lingkup diskusi internal, Forkom UI juga melakukan diskusi yang terbuka untuk umum. Saat itu, mereka menggelar diskusi publik yang mengangkat tema masalah HAM. Kegiatan tersebut diadakan di FISIP pada 10 Desember 1988 dengan menghadirkan pembicara seperti Emha Ainun Najib (budayawan), Sumitro (Mantan Pankopkamtib), dan Imam Prasojo (mantan Ketua SM FISIP). Meskipun pada saat itu Emha Ainun Najib sempat dilarang ke UI oleh pihak rektorat, namun setelah ada penjelasan dari Forkom UI bahwa kegiatan ini merupakan mimbar akademis, akhirnya rektorat mengizinkan Emha menjadi pembicara.⁷⁵

Menurut Andrinof, diskusi publik itu sebagai respon Forkom UI untuk memperingati Hari HAM se-dunia. Peserta yang hadir cukup banyak sekitar 50 mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas. Pada saat itu, jumlah peserta sebanyak itu sudah tergolong besar mengingat animo mahasiswa terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah (diskusi) masih sangat kurang. Mereka lebih antusias dengan kegiatan-kegiatan seperti konser musik dan pertandingan olah raga. Hal ini pula yang menyebabkan beberapa kegiatan diskusi lainnya yang diselenggarakan Forkom UI selalu sepi peserta. Bahkan untuk diskusi internal Forkom sekalipun, anggota yang hadir tidak pernah lengkap atau paling sering dihadiri antara empat sampai lima anggota Forkom UI (BPM-SMF).

⁷⁴ Wawancara dengan Merdias Almatsier (16 Maret 2009).

⁷⁵ Wawancara tertulis dengan Andrinof Chaniago (5 Desember 2008).

3.3 Sikap Forkom UI Terhadap SK. 0457 (SMPT)

Semenjak pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan penataan lembaga kemahasiswaan, mulai dari pembekuan Dema dan penerapan NKK/BKK pada 1978 sampai dikeluarkannya SK 0457 tahun 1990⁷⁶, telah terjadi kontroversi di kalangan mahasiswa. Hal ini dapat dipahami mengingat mahasiswa yang paling merasakan gejolak serta dampak dari pemberlakuan kebijakan pemerintah ini. Maka, tidaklah heran kalau pada masa pemberlakuannya terjadi gejolak dari para aktivis mahasiswa yang menentang dan menerima kebijakan pemerintah. Hal ini pula yang terjadi ketika mahasiswa merespon keluarnya SK Mendikbud No. 0457/U/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) sebagai pengganti kebijakan NKK/BKK.

Para aktivis mahasiswa di kampus-kampus besar seperti UI, ITB, UGM, IKIP Jakarta, dan USU menolak kebijakan tersebut. Alasan penolakan mereka karena dalam SK tersebut meski akan dihidupkannya kembali organisasi tingkat universitas yang bernama SMPT, tetapi organisasi itu adalah bentukan pemerintah yang sarat kepentingan politis. Di samping itu, konsep SMPT tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang menghendaki kedaulatan lembaga dari dan oleh mahasiswa seperti Dema. Namun di lain pihak, penerimaan terhadap SK 0457 ini datang dari para mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam KNPI. Dukungan KNPI ini disampaikan pada saat pertemuan dengan Mendikbud Fuad Hasan di kantornya pada Agustus 1990.

Di UI sendiri pada saat SK 0457 diberlakukan pada Juli 1990, maka mulai 1 Agustus 1990 Forkom UI secara intensif mengadakan pertemuan-pertemuan membahas SK 0457 yang di dalamnya mengatur konsep Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Pertemuan pertama diadakan di FKM UI yang dihadiri beberapa Ketua SMF dan BPMF. Dalam pertemuan itu, mereka sebenarnya telah mengagendakan masalah SMPT tetapi tidak dibahas karena Pembantu Rektor III, dr. Merdias Almatsier, membagikan edaran yang berisi pokok-pokok SK 0457 untuk dibahas dalam pertemuan tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan kesalahpahaman antara Forkom UI dan Rektorat yang disebabkan Forkom UI

⁷⁶ Terkait penjelasan umum SK 0457 dapat dilihat pada bab II dalam tulisan ini. SK 0457 merupakan sebutan populer yang sering dipakai mahasiswa untuk menyebut SK Menteri P dan K No. 0457/U/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

menginginkan salinan SK yang lengkap, bukan dalam bentuk edaran. Sedangkan maksud Purek III membuat edaran (pokok-pokok) dari SK tersebut adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahami SK.

Setelah Purek III memenuhi permintaan mahasiswa dengan memberikan salinan SK 0457 secara lengkap, Forkom UI berkumpul lagi di Fakultas Sastra (FS) pada 3 Agustus 1990. Salah satu agenda yang mereka bahas adalah pembicaraan awal tentang SMPT. Hasil pembahasan dalam pertemuan itu di antaranya (1) Forkom sepakat untuk mempelajari SK secara lebih cermat terlebih dahulu; (2) Disetujui tahapan-tahapan pembahasan SK; (3) perlunya dialog antara Forkom UI dengan pimpinan universitas dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).⁷⁷

Pada 9 Agustus, Forkom UI mengadakan pertemuan kembali di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan agenda utama pembahasan SMPT secara detail dari pasal sampai ayat. Dalam pertemuan ini Forkom UI menyimpulkan bahwa SMPT berpotensi tidak mengakar di kalangan mahasiswa karena keanggotaannya yang bersifat pendelegasian (*ex-officio*) dari para Ketua SMF, Ketua BPMF, Ketua UKM, dan Ketua HMJ. Selain itu, mahasiswa secara umum “diminimalisasi” partisipasinya. Eep Saefullah, koordinator Forkom UI 1990 – 1991 yang juga Ketua Senat FISIP UI pada periode yang sama, melihat beberapa pasal dalam SMPT mengandung nuansa elitis. Hal ini karena tugas pokok SMPT hanya mewakili mahasiswa, koordinasi antar lembaga kemahasiswaan, serta tidak mencantumkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan kemahasiswaan.⁷⁸

Sementara itu, KSM UI dari unsur UKM dalam pertemuan Forkom UI juga memberikan kritiknya terhadap SK 0457. KSM mempertanyakan persoalan yang belum dijelaskan dalam SK tersebut, di antaranya menyangkut masalah hubungan antar lembaga kemahasiswaan dan mekanisme kerja antar lembaga kemahasiswaan, seperti yang terlihat dalam pasal tentang fungsi dan tugas pokok SMPT. KSM juga menangkap kesan bahwa SMPT semacam badan legislatif

⁷⁷ “Dongeng Tentang SMPT” dalam *Majalah SUMA UI, No. 13 Tahun VI, 1997.*, hlm. 13 – 14. Pembahasan mengenai SMPT ini disajikan khusus dalam kolom laporan utama. Di kolom ini juga dimuat dokumentasi pribadi Eep Saefullah yang bertahuk “Kronologis Sikap Forkom Terhadap SK 0457/SMPT”

⁷⁸ *Idem.*, hlm. 14.

karena di sana yang dipentingkan adalah masalah perwakilan mahasiswa dan koordinasi kegiatan mahasiswa di tingkat Perguruan Tinggi.⁷⁹

Atas masukan dan pertimbangan dari para peserta rapat, Forkom UI kemudian mengusulkan kepada rektorat untuk meninjau kembali SK 0457. Selain itu, Forkom UI meminta pimpinan UI supaya membuat panduan kegiatan kemahasiswaan ke dalam SK Rektor dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa yang berhasil diinventarisasi oleh Forkom UI antara lain; (1) integrasi mahasiswa; (2) tumbuhnya kesadaran eksternal mahasiswa UI; (3) reorientasi keorganisasian yang mendekatkan mahasiswa UI pada realitas masyarakat; (4) kemandirian berorganisasi dan beraktivitas; dan (5) kedaulatan organisasi dengan menciptakan mekanisme dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

Selanjutnya Forkom UI mengadakan pertemuan di Fakultas Psikologi (FPsi) pada 11 Agustus dan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) pada 15 Agustus 1990. Dalam pertemuan ini dinyatakan SK 0457 tidak akomodatif terhadap kebutuhan mahasiswa sehingga secara resmi konsep SMPT yang tertuang dalam SK tersebut ditolak oleh Forkom.⁸⁰

Pertemuan lanjutan berlangsung kembali di FPsi dua hari kemudian (17 Agustus). Hasil penting dari pertemuan ini adalah pembuatan pernyataan pers (*press release*) ke media massa untuk menjelaskan sikap penolakan Forkom UI mengenai konsep SMPT tersebut. Forkom menilai bentuk SMPT yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan Forkom-Forkom yang tumbuh saat itu. Seandainya tidak ada perubahan mendasar atas konsep tersebut, maka sama saja bahwa SMPT tetap berada di dalam belunggu aturan NKK/BKK. *Press Release* yang dikeluarkan oleh Forkom UI juga sekaligus dimaksudkan untuk menanggapi ucapan Prof. Dr. Sujudi (Rektor UI saat itu) yang menyatakan ketidakrisauannya jika mahasiswa UI menolak SMPT. Pernyataan Rektor UI itu banyak dimuat di media massa sehingga menjadi pemberitaan yang cukup besar.

⁷⁹ Kritik ini diajukan secara tertulis KSM UI dalam bentuk kertas kerja berjudul "Beberapa Usulan Tentang SMPT" pada saat Rapat Kerja Kemahasiswaan 20 -21 Oktober 1991 di Cisarua.

⁸⁰ "Dongeng Tentang SMPT", *op.cit.*, hlm. 15

Reaksi keras dan berbagai komentar balik menanggapi *press release* Forkom UI tersebut bermunculan dari berbagai pihak. Rektor UI segera membuat pernyataan di beberapa media massa pada 27 Agustus 1990 yang menilai penolakan Forkom UI sebagai sebuah sikap yang tergesa-gesa. Rektor juga menganggap bahwa pernyataan Forkom UI itu tidak sah dan perlu diralat. Tanggapan terhadap sikap Forkom UI juga muncul dari Drs. M. Enoch Markum, Direktur Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi (Dikti), Depdikbud. Menurutnya, munculnya pernyataan seperti itu tidak lebih hanya salah paham, karena tidak ada pasal dalam SK 0457 yang menyebutkan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk menerapkan konsep SMPT.⁸¹

Tanggapan lebih keras lagi muncul dari Menteri P dan K Fuad Hassan yang menyatakan *press release* tersebut dinilainya justru menunjukkan bahwa mahasiswa tidak mengerti isi SK 0457. Fuad Hasan juga bertekad bahwa sebagai menteri, ia akan tetap bertanggung jawab terhadap SK tersebut. Sebagai menteri yang juga masih tercatat guru besar di FPsi UI, Fuad Hasan menyampaikan keberatannya kepada Dekan FPsi (Prof. Dr. Yaumil Agus Achir) atas penolakan Ketua SM FPsi Ferlita Sari terhadap SMPT. Dekan FPsi akhirnya bereaksi keras kepada Ferlita Sari dengan memberikan pilihan, “Kata Pak Fuad, jika SM FPsi tetap menolak SK 0457, maka Ketua SM FPsi yang keluar atau Pak Fuad yang keluar dari FPsi”. Tekanan serupa juga dialami oleh Ketua SM FH Haris dengan ancaman skorsing jika tetap menolak SK tersebut.⁸²

Tekanan dari Fuad Hassan dan pimpinan fakultas terhadap beberapa ketua SM ini mendorong Forkom UI melakukan pertemuan-pertemuan konsolidasi untuk mengkaji ulang SK.0457 secara mendalam. Dari pertemuan tersebut sebagian besar anggota Forkom UI memutuskan untuk berdialog dengan Fuad Hasan dan para pimpinan kampus guna mendapatkan titik temu. Dalam hal ini Forkom UI membuka peluang untuk menerima SK.0457 dengan catatan penjabarannya diatur dengan SK Rektor yang isinya tidak harus sesuai dengan SK 0457. Artinya, SK Rektor tersebut harus memuat beberapa ketentuan yang

⁸¹ Lihat “Wajar Mahasiswa Menolak, Konsep SMPT Tidak Menjamin Dinamisasi Kehidupan Kampus” dalam *Kompas*, edisi 27 Agustus 1990

⁸² Keterangan ini diperoleh pada saat wawancara dengan Eep Saefullah Fatah, 12 November 2008

diusulkan oleh mahasiswa dan disesuaikan dengan kondisi lembaga kemahasiswaan yang berada di lingkungan UI.

Di pihak lain, melihat ketegangan antara mahasiswa dengan pemerintah dan rektorat akibat *press release* Forkom UI yang dikirim ke media massa, Purek III UI segera memanggil para ketua SMF, BPM, Dekan, dan para Pembantu Dekan III (Pudek III) dalam pertemuan di rektorat pada hari Jum'at, 24 Agustus. Dari hasil pertemuan itu disimpulkan bahwa *press release* Forkom UI diinterpretasikan secara tidak tepat oleh media massa, terutama pada penyamaan "konsep SMPT" dengan "SK 0457".⁸³ Forkom UI menilai SK 0457 dapat diterima sebagai suatu kebijakan, tetapi konsep SMPT sebagai bentuk organisasi kemahasiswaan masih dianggap kurang memenuhi keinginan mahasiswa karena pemilihan ketua SMPT tidak dipilih langsung oleh mahasiswa melalui Pemilihan Raya (Pemira). Selain itu, SMPT dinilai tidak mengakomodasi lembaga legislatif untuk mengontrol jalannya lembaga eksekutif (SMPT) karena struktur SMPT terdiri para ketua SM-BPMF yang berbentuk presidium.

Dalam pertemuan itu, pimpinan universitas sepakat akan mempertimbangkan tuntutan mahasiswa ke dalam SK. Rektor meskipun tidak terlalu mengacu pada SK.0457. Pertimbangan ini merujuk kepada SK. 0457 pasal 16 ayat 2 tentang ketentuan penutup yang mengatur bahwa petunjuk teknis pelaksanaan SK.0457 ditetapkan oleh masing-masing pimpinan perguruan tinggi. Namun demikian, pimpinan UI meminta syarat agar Forkom UI tidak lagi menuntut penggantian nama SMPT dengan konsep *student government*, yakni Dema. Hal ini karena pimpinan UI menganggap Dema sudah dibubarkan sesuai hukum yang sah, di samping Dema juga dinilai memiliki struktur organisasi yang tidak terintegrasi dengan struktur universitas (seolah terpisah dari civitas akademika).⁸⁴

Berkaitan dengan hal itu, forum sepakat akan melakukan penjelasan ke berbagai pihak termasuk Menteri P dan K, yaitu bahwa Forkom UI tidak secara mutlak menolak SK tersebut. Forkom UI melalui koordinatornya, Eep Saefullah Fatah, menegaskan SK 0457 diterima sebagai sebuah kebijakan, namun konsep

⁸³ Lihat "Kronologis Sikap Forkom UI Terhadap SMPT" dalam catatan harian Eep Saefullah Fatah yang dimuat dalam *Majalah SUMA UI*, No. 13 Tahun VI, 1997., hlm. 13 – 17

⁸⁴ Wawancara dengan Merdias Almatsier (16 Maret 2009)

SMPT dalam SK tersebut setelah melalui pembahasan panjang dan matang, sementara ditolak karena dinilai tidak akomodatif terhadap kebutuhan mahasiswa UI. Forkom UI bisa saja akan menerima konsep SMPT jika aspirasi mahasiswa dapat dituangkan SK tersebut melalui peraturan teknis pimpinan universitas.

Akibat dari sikap Forkom UI ini, beberapa media massa menilai sikap Forkom UI tidak konsisten karena menerima SK 0457 tetapi menolak SMPT, padahal kedua hal tersebut merupakan satu paket kebijakan yang tidak bisa dipisahkan. *Suara Pembaruan* dalam suatu pemberitaan 28 Agustus 1990 mengungkapkan bahwa Forkom UI mendapatkan tekanan dari rektorat sehingga menyebabkan Forkom UI mengubah sikapnya dari penolakan menjadi penerimaan terhadap SK.0457.⁸⁵

Untuk merespon pemberitaan ini, Forkom UI memberikan penjelasan kepada *Suara Pembaruan* melalui *release* kedua yang dikirimkan pada tanggal 29 Agustus 1990. Menurut Eep Saefullah Fatah, inti dari *release* kedua tersebut menyatakan bahwa Forkom UI tidak menolak SK 0457 sebagai Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi. Hal ini karena Forkom UI memandang adanya peluang untuk dibentuknya organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang dicita-citakan mahasiswa serta pelaksanaan SK tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa UI. Oleh karena itu, organisasi tersebut tidak harus identik dengan SMPT.⁸⁶

Dalam sikapnya ini, Forkom UI dapat menerima konsep SMPT dengan beberapa catatan yang diajukan kepada pimpinan UI. Beberapa catatan tersebut di antaranya, SMPT yang akan dituangkan pada peraturan organisasi kemahasiswaan UI harus terdapat badan legislatif yang dijalankan mahasiswa yang dalam fungsinya bertanggung jawab kepada rektor. Selain itu, Forkom UI juga menginginkan hubungan yang tegas antara lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas. Dengan SMPT sebagai satu-satunya lembaga kemahasiswaan yang menjalankan fungsi eksekutif di tingkat universitas, maka

⁸⁵ Sebelumnya harian *Suara Pembaruan* memuat berita penolakan Forkom UI terhadap SMPT dengan judul "SM-BPM UI Tolak SMPT". Namun informasi ini hanya diperoleh dari foto klipng koran yang dipajang di *majalah SUMA UI* sehingga tidak diketahui tanggal pastinya. Penulis memperkirakan tulisan tersebut dimuat sebelum tanggal 29 Agustus 1990.

⁸⁶ Wawancara dengan Eep Saefullah Fatah (Koordinator Forkom UI 1990 – 1991), 12 November 2008

lembaga ini haruslah bertanggung jawab kepada lembaga legislative. Sedangkan dalam hal pemilihan ketua lembaga eksekutif, Forkom UI mengusulkan supaya dipilih langsung oleh mahasiswa melalui Pemira.⁸⁷

Meskipun demikian, ternyata masih ada perubahan terhadap isi *release* kedua yang telah dibuat di atas. Dengan pertimbangan jangka panjang⁸⁸, pernyataan baru itu akhirnya menjadi penerimaan SK 0457 yang penjabarannya sesuai dengan catatan-catatan yang diajukan Forkom dan Statuta UI. Setelah ditandatangani oleh ketua-ketua SMF-BPMF dibantu oleh Biro Humas Rektorat UI dan beberapa Pudek III, tanggal 2 September 1990 *release* perbaikan itu diedarkan ke media massa. Menyusul pernyataan resmi Forkom UI ini, pada kurun waktu 4 – 6 September 1990, berbagai media massa memuat *press release* Forkom dan berita-berita lain seputar SMPT yang intinya memuat persetujuan Forkom UI terhadap SK.0457.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Mahasiswa menilai di masa yang akan datang SMPT dapat dijadikan wadah baru bagi pergerakan mahasiswa yang selama ini mengalami kevakuman akibat kebijakan NKK/BKK.

⁸⁹ “Kronologis Sikap Forkom UI Terhadap SMPT”, *op.cit.*, hlm. 17

BAB 4

DARI FORKOM UI MENJADI SMUI: DINAMIKA FORKOM UI DALAM PEMBENTUKAN SMUI

4.1 Peran Forkom dalam Proses Pembentukan SMUI

Setelah Forkom UI mencapai kesepakatan bersama pimpinan UI terhadap SK.0457, selanjutnya Forkom UI diberikan tugas untuk menyusun bentuk kelembagaan yang akan diusulkan. Usulan tersebut nantinya akan diberikan kepada pimpinan UI untuk mendapat pembahasan tingkat lanjut. Pada perkembangan selanjutnya, Forkom juga ikut berperan penting dalam pembentukan organisasi baru kemahasiswaan tingkat UI yang kemudian dikenal dengan Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI). Peranan Forkom ini terlihat dari keterlibatan Forkom bersama pimpinan UI dalam pertemuan-pertemuan untuk merumuskan bentuk dan aturan SMPT UI (SMUI). Berikut ini beberapa pertemuan Forkom UI dengan para pimpinan UI yang menunjukkan tahapan ke arah pembentukan SMUI, yaitu:

4.1.1 Pertemuan Cisarua 1990: Merumuskan Konsep Awal SMPT UI

Perubahan sikap Forkom UI untuk menerima SK. 0457 akhirnya diambil setelah melalui pembahasan panjang baik yang dilakukan di internal para ketua SMF, BPMF, dan UKM, maupun dengan para pimpinan UI. Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Pertemuan Cisarua merupakan peristiwa penting karena dalam pertemuan ini telah ada kesepakatan bersama antara Forkom UI dengan Pimpinan UI untuk menentukan bentuk SMPT yang sesuai dengan kondisi UI. Menindaklanjuti sikap Forkom UI ini, pada awal Oktober 1990, Koordinator Forkom diundang oleh Rektor UI untuk mendiskusikan kemungkinan diadakannya rapat kerja bidang kemahasiswaan untuk mengkaji SK 0457.

Rapat kerja bidang kemahasiswaan ini akhirnya diadakan oleh rektorat pada 20 – 21 Oktober 1990 di Wisma Grand Park, Cisarua, Bogor. Peserta yang hadir dalam pertemuan Cisarua ini di antaranya para ketua SMF dan BPF yang tergabung dalam Forkom UI, serta UKM yang terdiri dari Bakor Olah Raga, KSM (Kelompok Studi Mahasiswa) “Eka Prasetya” UI, Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam), Menwa (Resimen Mahasiswa), Pramuka, Orkestra Mahawaditra, dan Liga Tari. Sedangkan dari pihak pejabat UI terdiri dari Purek III dr. Merdias Almatsier serta para Pudek III dari FK, FKG, FMIPA, FT, FH, FE, FS, FPsi, FISIP, FKM, dan Asisten Direktur Politeknik UI. Sementara itu, unsur pemerintah yang hadir diwakili oleh Enoch Markum selaku Direktur Kemahasiswaan Dikti mewakili Menteri P dan K, Fuad Hasan.⁹⁰

Agenda raker membahas (1) penjelasan dari pemerintah terkait SK Mendikbud No. 0457; (2) meminta masukan dari peserta raker tentang bentuk organisasi kemahasiswaan di UI berupa presentasi dari perwakilan Forkom UI, UKM, dan Rektorat. Dari raker inilah yang kemudian menghasilkan kesepakatan awal tentang pembentukan SMPT UI.

Pada kesempatan itu, Rektor UI Prof. Dr. Sujudi, dalam pembukaannya selain memaparkan rencana UI menjadi universitas riset 20 tahun ke depan, juga menyinggung pentingnya penataan lembaga kemahasiswaan yang berada di lingkungan UI. Sedangkan pemerintah melalui Enoch Markum dalam pidatonya menyatakan bahwa: pengaturan pedoman organisasi kemahasiswaan sepenuhnya telah diserahkan kepada masing-masing kampus dengan mengacu pada SK 0457; SMPT dibentuk untuk memenuhi tuntutan dunia pendidikan (mahasiswa dan lain-lain) dan dimaksudkan untuk menggantikan NKK/BKK di mana selama ini pimpinan perguruan tinggi yang memegang koordinasi atas segala kegiatan kemahasiswaan; SMPT harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan mahasiswa; dan penjabaran umum SK 0457.

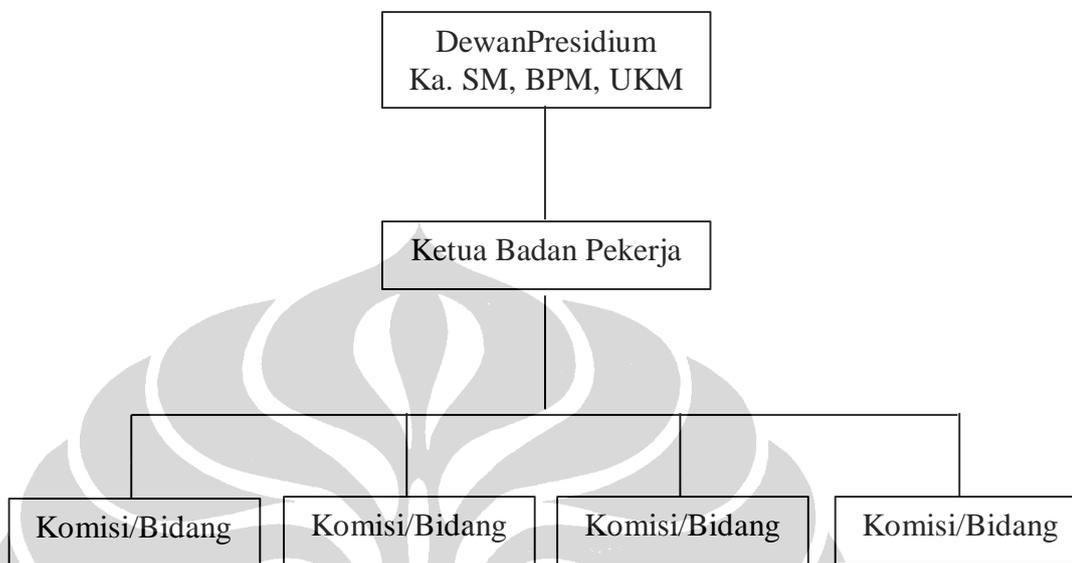
⁹⁰ Data-data tersebut dapat dilihat dari notulensi sidang sejak proses pembentukan SM UI sampai terbentuknya SM UI Periode 1992 – 1993. Menariknya kumpulan notulensi tersebut dihimpun oleh Riri Fitri Sari (Ketua KSM UI 1991 – 1992) dalam satu bundel buku “Notulensi Sidang-Sidang SM UI Masa Kepengurusan I 1992 – 1993”. Sementara itu penulis tidak menemukan arsip tentang SM UI yang penulis cari di sekretariat SM UI/BEM UI di Pusgiwa.

Agenda selanjutnya adalah sesi pertemuan informal (sidang) antar unsur mahasiswa, yakni UKM, BPM-SM (Forkom) untuk membahas usulan bentuk SMPT UI. Sidang antar mahasiswa ini dipimpin oleh Haris (Ketua SM FH UI) dan dimulai pukul 20.00 WIB (tanggal 20 Oktober). Haris memulai pembicaraan dengan meminta kepada peserta untuk mencari persamaan antar-pandangan unsur-unsur mahasiswa yang hadir tentang SK 0457 dengan semangat ke-UI-an. Peserta diminta mengambil inisiatif untuk mempresentasikan hasil kajiannya masing-masing. Berhubung tidak ada yang mengambil inisiatif untuk memulai presentasi, akhirnya KSM UI mencoba mengambil inisiatif. Presentasi tersebut disampaikan oleh Ahmad Yani (Ketua KSM) mewakili unsur UKM. Bahan presentasi ini sebelumnya juga pernah disampaikan pada pertemuan dengan ketua-ketua UKM dan pimpinan UI pada tanggal 12 dan 13 Oktober 1990.

Dalam presentasinya, KSM mengusulkan bentuk dan susunan SM UI yang di antaranya; (1) SMPT UI berbentuk presidium yang terdiri dari Dewan Presidium, Badan Pekerja, dan Komisi. (2) Keanggotaan Dewan Presidium berasal dari para ketua SMF, ketua BPF, dan Ketua UKM, dengan komposisi 11 SM, 11 BPM, dan 5 UKM, sehingga total anggota Dewan Presidium berjumlah 27 orang. Dalam menjalankan organisasinya, Dewan Presidium memilih ketua yang berfungsi sebagai Badan Pekerja. (3) Dewan Presidium bertugas membuat GBPK, memilih, mengangkat, dan memberhentikan Badan Pekerja, serta mengawasi roda organisasi dan pelaksanaan kegiatan SM UI yang dijalankan oleh Badan Pekerja. (4) Badan Pekerja terdiri dari seorang ketua dan lima komisi yang dipilih dan diangkat oleh Dewan Presidium dan disahkan oleh rektorat. (5) Komisi SMUI terdiri dari lima komisi dengan tiap komisi diisi oleh 2 wakil UKM, 2 wakil BPM, dan 2 wakil SM. Komisi-komisi tersebut di antaranya komisi bidang penalaran, olah raga, kesenian, pembinaan mental dan pengabdian masyarakat, serta lingkungan hidup dan pencinta alam. (6) Masa kepengurusan SMUI satu tahun.⁹¹

⁹¹ *Ibid.*, struktur SM UI usulan KSM terlampir.

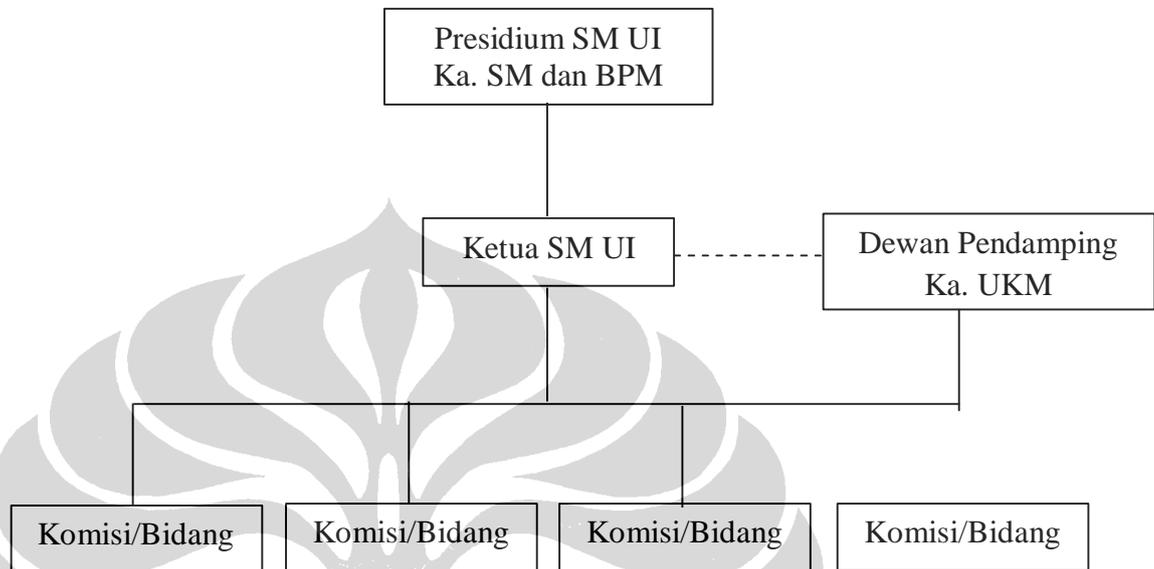
Struktur SMUI usulan KSM UI



Pada kesempatan kedua, presentasi dibawakan Forkom UI yang dalam hal ini disampaikan oleh Eep Saefullah. Apa yang diusulkan Forkom UI tidak jauh berbeda dengan usulan KSM UI, hanya saja ada beberapa penambahan di antaranya; (1) Struktur SMUI terdiri dari Presidium (terdiri dari para ketua SM dan BPM), Dewan Pendamping yang keanggotaannya terdiri dari para ketua UKM, serta Komisi-komisi yang terdiri dari perwakilan SM, BPM, dan UKM. (2) Ketua SMUI dipilih dari salah satu anggota presidium. (3) Hubungan antara SM UI dengan UKM bersifat koordinasi, sedangkan hubungan SM UI dan UKM dengan rektor bersifat vertikal dalam arti bertanggung jawab kepada rektor.⁹²

⁹² *Ibid.*, struktur SM UI usulan KSM terlampir.

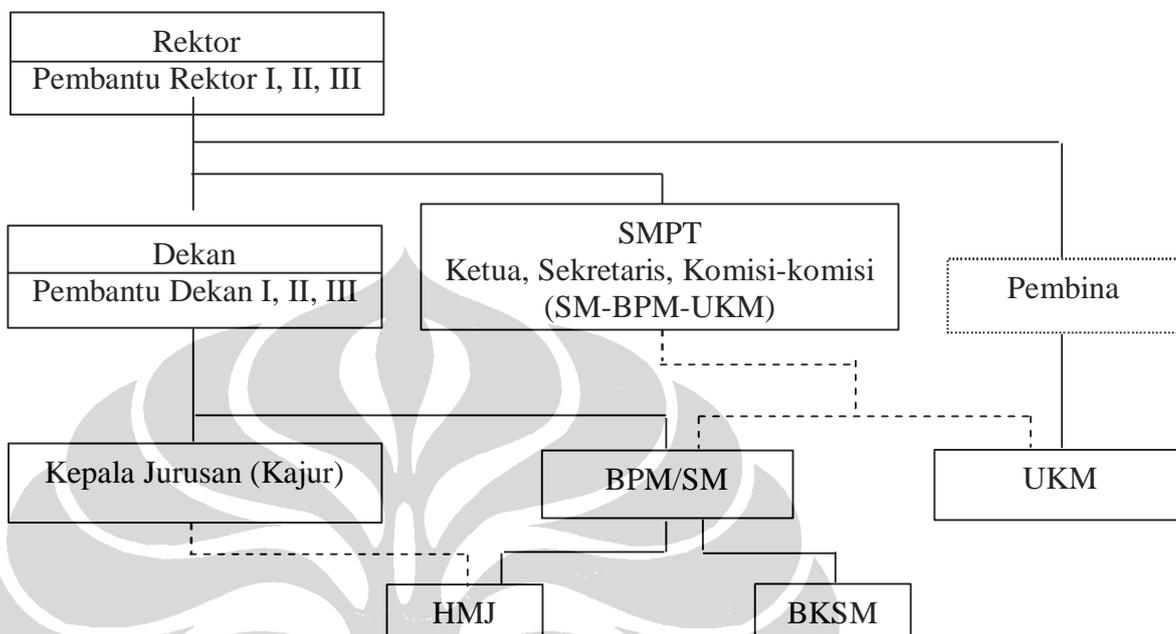
Struktur SMUI usulan Forkom



Di luar struktur SMUI yang diusulkan Forkom UI dan UKM, rektorat juga dalam kesempatan itu memberikan usulan struktur. Di samping itu, pihak rektorat juga mengharapkan supaya Forkom UI tidak mengganti nama SMUI dengan nama lain yang isunya sempat beredar selama rapat kerja (raker). Berdasarkan laporan dari Pudek III FK, dalam sidang antar mahasiswa sempat terlontar pergantian nama SM UI dengan nama-nama seperti, “Persatuan Mahasiswa”, “Ikatan Mahasiswa UI”, “Pemerintahan Mahasiswa”. Bahkan perwakilan dari SM FT dengan tegas menyatakan organisasi mahasiswa harus kembali pada “Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI”.⁹³ Namun demikian, usulan-usulan tersebut akhirnya meredup setelah ada negosiasi mahasiswa dengan rektorat. Kesepakatan yang dicapai yaitu SMUI akan tetap dipertahankan, tetapi mahasiswa meminta supaya struktur SMUI yang akan dibentuk tidak harus sama dengan yang tertuang dalam SK 0457.

⁹³ Wawancara dengan Kholid Novianto (Ketua BPM FS UI 1991 – 1992) pada, 11 November 2008. Sedangkan mengenai bagan struktur SMPT UI yang diusulkan Rektorat dapat dilihat dalam bundel “Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusan 1 (1992 – 1993)” yang disusun oleh Riri Fitri Sari (KSM UI).

Struktur SM UI usulan rektorat



Keterangan:

BKSM : Badan Kelengkapan Senat Mahasiswa

HMJ : Himpunan Mahasiswa Jurusan

———— Komando

----- Koordinatif

Acara kemudian dilanjutkan dengan dialog antar-para peserta sidang. Ada beberapa perbedaan yang muncul. Pertanyaan yang belum terjawab oleh Forkom UI adalah menyangkut siapa Ketua SMUI dan kedudukan UKM yang dilebur dalam SMUI. Hal lain yang dipertanyakan oleh forum adalah menyangkut dualisme tanggung jawab dari ketua SMUI mengingat anggota yang duduk di Badan Pekerja ataupun Presidium notabene adalah para ketua SM, BPM, dan UKM yang masih aktif menjabat. Belum ada kesepakatan penting dari sidang yang berakhir sekitar pukul 24.00 tersebut. Akhirnya forum sepakat acara akan dilanjutkan besok pagi (21 Oktober 1990). Akan tetapi, acara informal selepas sidang itu segera dimanfaatkan oleh para pimpinan mahasiswa dengan menggelar pertemuan intern masing-masing.

UKM yang dipelopori oleh Menwa menggelar pertemuan intern yang terdiri dari KSM, Menwa, Mapala, Bakor OR, dan Mahawaditra membahas kemungkinan perubahan kertas kerja yang akan diusulkan UKM. Pertemuan internal juga dilakukan oleh Forkom UI hingga pukul 05.00 WIB. Selanjutnya setelah melakukan pertemuan internal, masing-masing kelompok melakukan lobi untuk mencapai kesepakatan bersama.⁹⁴ Kesepakatan bersama antara Forkom dengan UKM ini akhirnya dapat dicapai.

Pada esok harinya (21 Oktober 1990), kesepakatan yang dicapai antara Forkom dan UKM tersebut dibacakan oleh Eep Saefullah (perwakilan Forkom) dan Ahmad Yani (perwakilan UKM) dalam Sidang Rapat Kerja Kemahasiswaan yang dipimpin oleh Drs. Iman Sukhirman (Pembantu Dekan III FPsi) dan Sekretaris Sidang drg. Harun A. Gunawan, MS (staf kemahasiswaan UI). Setelah melalui beberapa tahapan sidang, maka dihasilkan beberapa kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan UI yang dituangkan dalam draf memorandum. Draf memorandum tersebut berisi tentang Pokok-pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Indonesia, dalam hal ini Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SMUI), yang tertuang dalam draf memorandum SMUI.⁹⁵

4.1.2 Memorandum SMUI 1991: Kesepakatan Bersama antara Forkom UI dengan Pimpinan UI

Sehari setelah pertemuan di Cisarua, Forkom UI dan perwakilan UKM melakukan pembahasan-pembahasan penting untuk menindaklanjuti butir-butir kesepakatan Cisarua. Hal-hal yang dibahas terkait penyempurnaan draf memorandum SMUI yang belum disepakati pada Pertemuan Cisarua tahun 1990. Sementara itu, pihak rektorat akan mempersiapkan SK Rektor tentang pedoman organisasi kemahasiswaan di UI sambil menunggu masukan dari hasil-hasil kesepakatan dalam memorandum yang sedang disempurnakan.

⁹⁴ Keterangan ini diperoleh dari “Notulensi Sidang-Sidang SM UI Masa Kepengurusan I (1992 – 1993)”. Tanpa nomor halaman.

⁹⁵ “Risalah Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan UI Tahun 1990” dalam Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusan I (1992 – 1993).

Namun, pada saat sebelum memorandum disepakati, sebagian besar Ketua SM dan BPFM telah mengalami pergantian sehingga yang menandatangani memorandum adalah para ketua SM dan BPFM yang baru. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Forkom UI juga telah berganti dari Eep Saefullah kepada Ahmad Fikri (Ketua SM FH).⁹⁶ Dengan demikian, terhitung sejak Pertemuan Cisarua pada Oktober 1990 sampai dengan pengesahan memorandum pada 5 Agustus, terjadi periode pewarisan dari aktivis lama kepada aktivis baru Forkom. Para Ketua SM/BPFM baru yang duduk di Forkom UI juga kembali melakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap isi memorandum hingga memakan waktu hampir satu tahun.

Akhirnya pada tanggal 5 Agustus 1991, memorandum baru bisa ditandatangani oleh pimpinan UI, Forkom UI, dan UKM. Dalam memorandum kesepakatan itu berhasil diperjuangkan tentang keinginan mahasiswa untuk mengadakan Pemira (meskipun baru bisa direalisasikan pada tahun 1994) untuk memilih Ketua Harian SMUI yang memiliki fungsi eksekutif. Sedangkan Ketua Umum SMUI yang nantinya bertindak sebagai badan legislatif akan dipilih oleh Sidang Para Ketua BPFM.⁹⁷

Mahasiswa berharap SK Rektor mengenai pembentukan SMUI tidak akan berbeda jauh dari isi memorandum. Isi dari memorandum tersebut di antaranya memuat ketentuan-ketentuan penting sebagai berikut:⁹⁸

1) Susunan dan penamaan/sebutan jabatan kepengurusan SMUI

Ketua Presidium disebut sebagai Ketua Umum (fungsi legislatif)

Anggota Presidium disebut sebagai Wakil Ketua Umum, atau Para Ketua, atau Presidium Ketua, atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.

Presidium SMUI terdiri dari Para Ketua BPFM

⁹⁶ Wawancara Eep Saefullah Fatah (Koordinator Forkom 1990 – 1991), pada 12 November 2008. Saat itu, Eep juga mengatakan Ahmad Fikri dan Forkom generasi berikutnya sangat intens menyempurnakan draf memorandum.

⁹⁷ “Kilas Balik Pemira UI” dalam *Majalah SUMA UI, No. 11 Tahun V, 1996.*, hlm. 21

⁹⁸ “Memorandum Kesepakatan tentang SMUI Tahun 1991” dalam *Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusan 1 (1992 – 1993).*

Ketua Badan Pelaksana disebut sebagai Ketua Harian (fungsi eksekutif).

Dewan Pendamping disebut sebagai Tim Pendamping, atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.

Tim Pendamping; Tim Pendamping Ketua Harian dalam susunan kepengurusan SMUI beranggotakan para Ketua SMF dan Ketua UKM.

Anggota pengurus lainnya merupakan Ketua dan Anggota Komisi.

2) Hubungan SMUI dengan Pimpinan UI

Ketua Umum merupakan Pimpinan SMUI dan bertanggung jawab terhadap kelancaran organisasi SMUI.

Hubungan Ketua Umum dengan Pimpinan UI adalah hubungan tanggung jawab. Sedangkan Ketua harian sebagai pelaksana koordinasi kegiatan sehari-hari dapat berhubungan dengan Pimpinan UI.

3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Hubungan UKM dengan SMUI merupakan hubungan koordinasi. UKM mempunyai hak otonomi dalam hal pengelolaan dana, personalia, dan program kerja.

UKM bertanggung jawab kepada Pimpinan UI melalui SMUI.

UKM Khusus (Menwa dan Pramuka) bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan UI. Sedangkan hubungan UKM Khusus dengan SMUI adalah hubungan koordinasi.

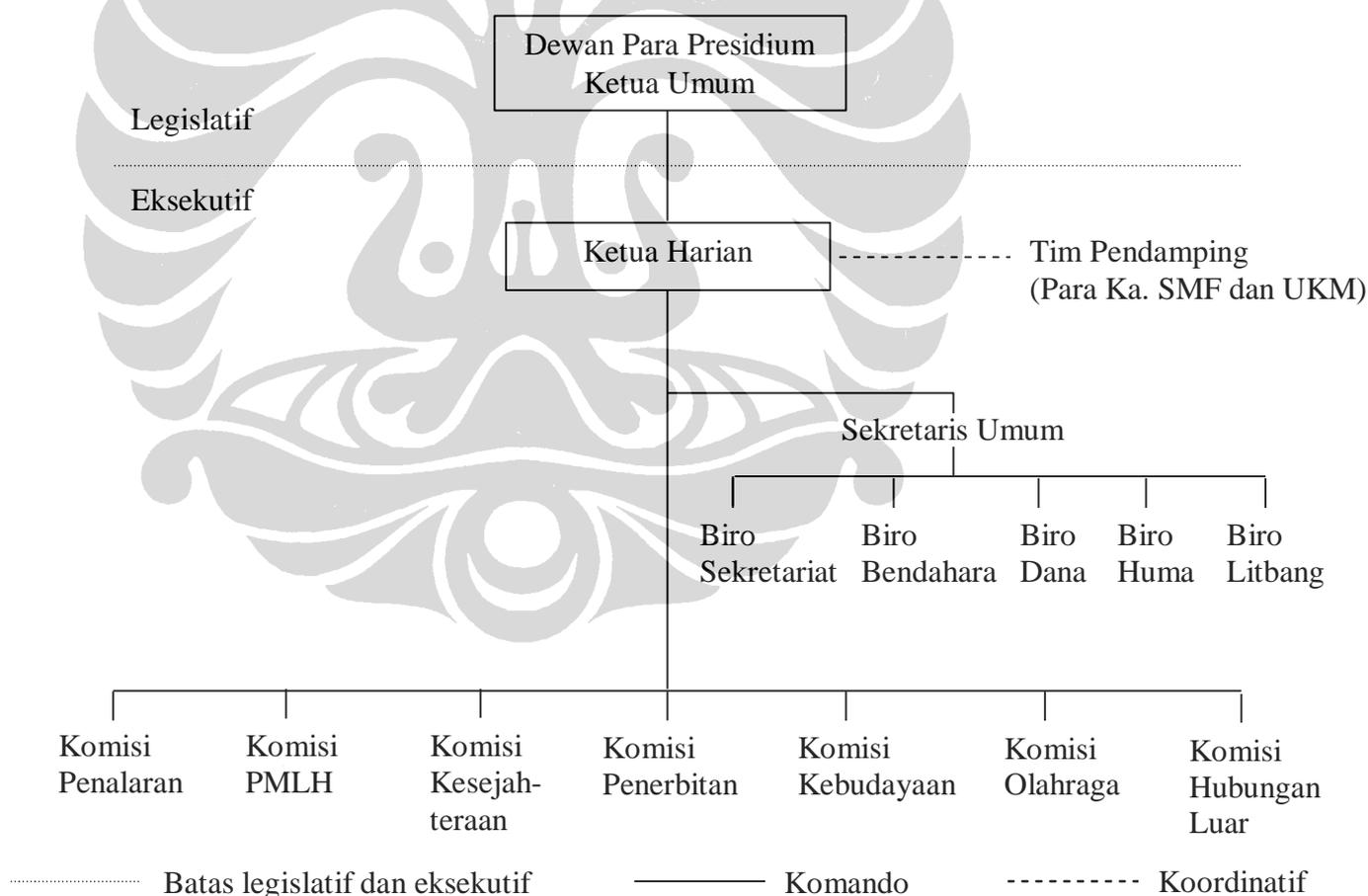
4) Pengukuhan; SM UI dikukuhkan oleh Rektor UI

5) Pemilihan Ketua Harian dilakukan oleh Presidium selama masa transisi (dua tahun periode kepengurusan SMUI). Setelah masa transisi, Ketua Harian dipilih oleh mahasiswa secara langsung melalui Pemilihan Raya (Pemira) yang dimulai tahun 1994.

6) Ketua Harian dicalonkan oleh tiap-tiap fakultas dan calon tersebut adalah mahasiswa UI yang bukan ketua SMF, BPMF, dan UKM.

- 7) Anggota Komisi adalah mahasiswa UI yang memenuhi kriteria tertentu, dan dapat terdiri dari anggota SMF, anggota UKM, dan atau Ketua UKM yang tidak termasuk ke dalam anggota Tim Pendamping.
- 8) Dalam diagram organisasi, Tim Pendamping terletak sejajar dengan Ketua Harian dengan garis koordinasi.
- 9) Hal-hal tentang Pokok-pokok Organisasi Kemahasiswaan UI yang masih dalam pembicaraan, antara lain menyangkut anggota tambahan untuk presidium, keseragaman waktu pemilihan Ketua SMF/BPMF/UKM, dan Pemira, merupakan materi pembahasan pada pertemuan bidang kemahasiswaan berikutnya.⁹⁹

Adapun struktur kepengurusan SMUI yang disepakati dalam memorandum ini adalah sebagai berikut:¹⁰⁰



⁹⁹ Mengenai struktur dan keterangan/penjelasan dari struktur kepengurusan SM UI tersebut dapat dilihat dalam lampiran pada penelitian ini.

¹⁰⁰ Mengenai keterangan/penjelasan dari struktur kepengurusan SM UI tersebut dapat dilihat dalam lampiran pada penelitian ini.

Di bagian akhir memorandum SMUI disebutkan bahwa kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan UU No.2 Tahun 1989, PP No. 30 Tahun 1990, SK Mendikbud No. 0457/U/1990, dan dicapai dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan di Cisarua dan Gedung Rektorat UI Depok sejak 21 Oktober 1990 sampai ditandatanganinya memorandum itu (5 Agustus 1991). Memorandum itu ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dalam Rapat Kerja Bidang Kemahasiswaan UI tahun 1991 yang terdiri dari dari Pembantu Rektor III UI dan staf, seluruh Pembantu Dekan III se-UI, Forkom UI yang terdiri dari seluruh Ketua SM dan BPM, serta UKM se-UI.¹⁰¹

4.1.3 Proses Pemilihan Ketua SM UI

Satu bulan lebih pasca-penandatanganan memorandum, maka pada 22 Oktober 1991 pembentukan SMUI disahkan dengan dikeluarkannya SK Rektor No. 120/SK/R/UI/1991, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) di Universitas Indonesia. Hampir semua pasal dalam ketetapan itu tidak jauh berbeda dengan hasil-hasil kesepakatan bersama antara Forkom UI, UKM, dan Pimpinan UI, baik yang tertuang dalam memorandum (5 Agustus 1991) maupun dalam petunjuk pelaksana SM UI (1 Oktober 1991). Pada tanggal yang sama, Rektor UI juga mengeluarkan SK No. 121/SK/R/UI/ 1991, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Indonesia.¹⁰²

Untuk menindaklanjuti kedua ketentuan itu, Forkom UI segera melakukan rapat pleno dengan agenda pembentukan panitia pemilihan ketua harian SMUI. Melalui SK Rektor, Forkom UI diminta menyusun peraturan pemilihan, namun tidak boleh bertentangan dengan SK Rektor. Akhirnya panitia pemilihan berhasil dibentuk oleh Forkom UI dengan anggota dari perwakilan mahasiswa UI yang direkrut dari setiap SM/BPMF masing-masing. Sedangkan untuk pemilihan ketua panitia, Forkom UI mengadakan mekanisme khusus yaitu melalui presentasi calon tentang konsep program di

¹⁰¹ Terlampir

¹⁰² Lihat Rudhy Suharto, "Sejarah Kemahasiswaan UI: Dari DM UI Sampai SM UI", dalam artikel *Majalah SUMA UI, Juni (Edisi Perdana) 1992.*, hlm. 19. Sementara naskah SK Rektor No. 120 dan No. 121 Tahun 1991 itu dapat penulis temukan juga dalam *Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusabn I (1992 – 1993)*.

hadapan anggota Forkom UI. Saat itu, hanya ada calon tunggal yang mengajukan, yaitu Novian Pranata (FPsi'88), dan selanjutnya ia ditetapkan sebagai ketua panita.¹⁰³

Sementara itu, pada 1 November 1991 di Fakultas Kedokteran Salemba, dilaksanakan Sidang Terbatas Para Ketua BPFM untuk memilih ketua umum SMUI. Proses pemilihan Ketua Umum ini berjalan dengan mudah karena hampir semua peserta yang hadir sepakat mengangkat Firdaus Artoni (Ketua BPM FK) sebagai ketua umum. Hasil ketetapan ini selanjutnya akan dibawa ke dalam sidang pleno untuk mendapatkan pengesahan Forkom UI dan UKM.¹⁰⁴

Setelah sidang terbatas para ketua BPFM, Forkom UI kemudian mengadakan rapat pleno di Fakultas Psikologi. Rapat dipimpin oleh Ahmad Fikri selaku Koordinator Forkom UI menggantikan Eep Saefullah. Sedangkan agenda yang dibahas pada saat itu adalah membuat tata tertib pemilihan ketua harian SMUI yang mengacu pada SK Rektor No. 121, serta pengesahan ketua umum SMUI. Sekitar pukul 18.00, Forkom UI berhasil menyelesaikan tata tertib pemilihan ketua harian yang memuat persyaratan calon ketua harian, langkah-langkah pencalonan, kampanye, serta mekanisme sidang pemilihan. Sidang pleno ditutup dengan pengesahan Firdaus Arthoni sebagai Ketua Umum SMUI periode 1992 – 1993.¹⁰⁵

Begitu tata tertib ditetapkan, panitia segera melakukan publikasi pembukaan pendaftaran calon beserta persyaratan dan formulir pendaftaran ke semua SMF. Formulir yang diterima SMF kemudian ditindaklanjuti bersama BPFM dengan menetapkan satu calon dari fakultas dan mengajukannya kepada panitia selambat-lambatnya 24 jam sebelum kampanye. Panitia berkewajiban mempublikasikan nama-nama calon ketua harian tersebut melalui selebaran dan media lain kepada seluruh mahasiswa UI. Setelah itu

¹⁰³ Lihat “Notulensi Rapat Presentasi PO (Ketua Panitia) Pemilihan Ketua Harian SM UI”, dalam *Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusabn I (1992 – 1993)*.

¹⁰⁴ “Notulensi Sidang Para Ketua”, dalam *Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusan (1992 – 1993)*. Dalam rapat ini juga mengagendakan pembahasan Petunjuk Pelaksanaan SM UI. Lihat juga “Firdaus Artoni Sebagai Ketua Umum” dalam *Warta UI No.53 Tahun XIV Desember 1991*.

¹⁰⁵ *Ibid*

panitia menyampaikan daftar nama calon kepada Koordinator Forkom UI dan melaporkan kesiapannya untuk dilaksanakan acara kampanye dan pemilihan.

Pada waktu itu muncul tiga calon yang diajukan oleh satu atau gabungan SMF ditambah UKM. Calon ketua harian SMUI yang berhak mengikuti pemilihan harus berasal dari mahasiswa yang bukan sebagai Ketua SM-BPMF dan UKM yang sedang aktif menjabat. Di antara calon yang memperebutkan posisi ketua harian SMUI, yaitu Eep Saefullah (mantan Ketua SM FISIP dan mahasiswa angkatan 1987), Satya Heragandhi (mahasiswa MIPA angkatan 1988), dan Chandra M. Hamzah (Mantan Ketua Bidang SM FH dan mahasiswa angkatan 1986). Ketiga calon ini akan diuji di hadapan Ketua Umum SMUI, para ketua SM-BPMF, dan UKM dalam sidang Forkom UI dengan memaparkan visi-misi dan kampanye lisan.¹⁰⁶

Dari ketiga calon yang muncul, nama Eep Saefullah merupakan kandidat terkuat sekaligus diunggulkan oleh sebagian besar anggota Forkom UI. Hal ini dapat dipahami mengingat Eep dianggap sangat berjasa dalam merumuskan SMPT UI dan terdapat ikatan historis yang kuat dengan Forkom UI. Selain itu, Eep dikenal sebagai mahasiswa pemikir yang berkepribadian tenang. Akan tetapi, sehari sebelum kampanye, Eep Saefullah secara tiba-tiba menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan.¹⁰⁷

Alasan pengunduran Eep karena ia tidak sepakat dengan mekanisme kampanye yang diadakan Forkom UI yang dinilainya sangat elitis. Usulan Eep supaya para kandidat berkampanye ke setiap fakultas guna mengakarkan kandidat dan lembaga SMUI, tidak dipenuhi oleh panitia dan Forkom UI. Forkom UI menolak usulan tersebut karena dalam masa transisi Forkom UI bersama ketua UKM memiliki kewenangan menentukan ketua harian SMUI.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kholid Novianto (Ketua BPM FS 1991 – 1992), 11 November 2008 dan Wawancara Eep Saefullah Fatah (Koordinator Forkom 1990 – 1991), 12 November 2008.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pada saat itu, Kholid mengatakan dengan pengunduran diri Eep membuat sebagian besar anggota Forkom kecewa. Hal ini disebabkan Forkom sangat menaruh harapan kepada Eep untuk menduduki posisi Ketua Harian SM UI. Padahal langkah Eep tinggal selangkah lagi, namun menjelang dua hari sebelum pelaksanaan kampanye, Eep memutuskan tidak mengembalikan formulir dan menyatakan pengunduran dirinya.

Adapun mekanisme yang diusulkan Eep, menurut Forkom UI, baru bisa dijalankan pada saat Pemira 1994 sesuai kesepakatan dalam memorandum.¹⁰⁸

Akhirnya, pada tanggal 4 Desember 1991 sidang Pleno Forkom UI dengan agenda pemilihan ketua harian SMUI digelar di FPsi UI yang baru dimulai pukul 19.00 WIB. Sidang dipimpin oleh Ketua Umum SM UI Firdaus Artoni. Sidang ini dihadiri oleh para ketua BPMF; Hikari AS (FK), Handoko (FKG), Teguh Wiratmoko (FMIPA), Harry Hariawan (FT), Freddy Harris (FH), Daulat Pohan (FE), Kholid Novianto (FS), Lohjenawi T (FPsi), Iman Santosa (FISIP), Bambang K (FKM), Slamet Supriadi (Politeknik). Kemudian para Ketua SMF; Gatot Abdurrazak (FK), Chaerita M (FKG), Syamsul (FMIPA), Wijaya Kusuma (Teknik), Ahmad Fikri (FH), Ahmad Syarofi (FS), Bagus Hendraning (FISIP), Jamalul Insan (FKM), Kendi Moro (Politeknik). Sementara ketua UKM yang hadir yaitu Hendra Nurcahyo (KSM), Nuralam (UKOR), Didik Cahyanto (Seni), dan Taqyudin (PMLH).¹⁰⁹

Proses pemilihannya sendiri berlangsung cukup alot. Hal itu terlihat dari proses pemilihannya yang memakan waktu cukup panjang dan pemilihan baru usai pada pukul 2.00 dinihari. Sedianya pemilihan dimulai pukul 14.00 ternyata harus diundur sampai pukul 19.00. Hal ini disebabkan adanya ketidaksamaan pendapat dari para ketua BPM-SM fakultas yang duduk di kepengurusan SMUI. Tepat pukul 19.00 acara pemilihan dimulai, para kandidat yang hadir yaitu Chandra M. Hamzah (mahasiswa FH angkatan 1986) dan Satya Heragandhi (mahasiswa FMIPA angkatan 1988). Sedangkan kandidat Eep Saifullah (mahasiswa FISIP angkatan 1987) mengundurkan diri melalui surat terbuka yang ditandatangani tanggal 3 Desember.¹¹⁰

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan kampanye lisan atau pemaparan visi-misi dari kandidat tentang SMUI ke depan. Kesempatan pertama untuk berkampanye diberikan kepada Chandra M. Hamzah. Dalam pemaparannya, Chandra M. Hamzah membawakan makalah yang berjudul “Back To People”.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Eep Saefullah Fatah (Koordinator Forkom 1990 – 1991), 12 November 2008.

¹⁰⁹ Lihat “Daftar Hadir Peserta Rapat Pleno” dalam *Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusabn I (1992 – 1993)*.

¹¹⁰ Menurut Ketua panitia pemilihan ketua harian SMUI, Novian Pranata (FPsi’88), dalam “Chandra M. Hamzah Ketua Harian”, *Warta UI No.53, Tahun XIV, Desember 1991*.

Ia menginginkan SMUI tidak terkurung dalam permasalahan internal kampus, tetapi juga dapat terjun langsung di masyarakat. Berikut ucapan Chandra yang disampaikan dalam sidang pleno Forkom UI:

“Back to people membawa pesan bahwa mahasiswa sebenarnya memiliki hutang pada rakyatnya. Untuk itu, mahasiswa harus menunjukkan perhatian secara langsung pada rakyat, memiliki tugas memberdayakan, serta menaruh kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi mereka. Di samping itu, mahasiswa UI juga harus berani berargumen dan mengeritik dengan tetap menampakkan integritas intelektualitasnya. Atas dasar itulah, saya akan membawa SMUI dengan semangat back to people.”¹¹¹

Sementara kandidat lain, Satya, juga memiliki penilaian tersendiri. Satya merupakan aktivis SM MIPA yang juga aktif di komite aksi. Ia dikenal sebagai aktivis yang keras serta memiliki pemahaman yang baik tentang konsep IKM UI. Dalam kampanyenya, Satya menginginkan SMUI harus dikembalikan fungsinya sesuai dengan ketentuan IKM UI. Untuk itu, Satya berharap supaya SMUI ke depan dapat membenahi lembaga kemahasiswaan yang dinilainya terjadi kekacauan dalam struktur dan koordinasi. Menurutnya, salah satu cara untuk menata lembaga kemahasiswaan adalah dengan menyelenggarakan Musyawarah Mahasiswa (Musma) IKM UI.

Jika mencermati pemaparan dari kedua kandidat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menarik tentang SMUI versi Satya dan versi Chandra. SMUI yang dicita-citakan Satya adalah SMUI dengan semangat “Back To IKM UI”, sedangkan Chandra dengan semangat “Back To People”. Namun dari keduanya terdapat titik persamaan yaitu akan menjadikan SMUI sebagai wadah yang aspiratif dan dapat diterima di kalangan mahasiswa.

Setelah para kandidat berkampanye lisan, dilanjutkan tanya jawab antara mahasiswa yang hadir dengan para kandidat. Dalam sesi ini sempat memanas ketika salah seorang anggota Forkom mempersoalkan latar belakang Chandra yang merupakan kader HMI. Menurutnya, ketua SMUI harus bebas dari keanggotaan ormas tertentu atau tidak membawa kepentingan ideologis

¹¹¹ “Optimisme Chandra” dalam *Majalah Suara Mahasiswa UI, Edisi Perdana (Juni 1992)*, hlm. 13. Kolom ini memuat liputan utama tentang profil ketua umum dan ketua harian SM UI. Keterangan serupa juga diperoleh berdasarkan wawancara eksklusif reporter *Majalah SUMA UI* dengan Ketua Harian SM UI Chandra M. Hamzah, dalam *Majalah SUMA UI, No. 13 Tahun VI, 1997.*, hlm. 11 – 12.

HMI yang berinduk pada Golkar karena hal tersebut dapat merusak netralitas dan kredibilitas SMUI. Namun pendapat tersebut dipatahkan oleh anggota Forkom yang lain, yaitu Bagus Hendraning (Ketua SM FISIP). Bagus menyatakan bahwa sebagai mahasiswa kita jangan naif dengan masih mempersoalkan dari mana latar belakang kandidat. Bagus memberikan contoh bahwa dulu para ketua Dema juga banyak yang latar belakangnya HMI, PMKRI, sosialis, tetapi tidak ada masalah. Untuk itu, Bagus meminta forum tidak perlu lagi mempermasalahkan latar belakang Chandra.¹¹²

Sistem pemilihan diselenggarakan secara langsung, umum, terbatas dan rahasia. Terbatas artinya yang berhak memilih adalah ketua BPM dan SM fakultas (Forkom) dan ketua UKM. Ternyata setelah suara semua masuk, salah seorang anggota Forkom UI memprotes jumlah suara yang masuk. Menurutnya UKM khusus tidak berhak memilih. Dalam SMUI, UKM dibagi menurut jenis kegiatannya, yaitu UKM kesejahteraan mahasiswa (KOPMA), UKM lingkungan (MAPALA dan Pramuka), UKM olah raga, UKM Kesenian (Mahawaditra, Liga tari, *Marching band*), dan UKM khusus (Menwa).

Akhirnya, pemilihan suara harus diulang setelah mencapai kata sepakat bahwa UKM khusus tidak mempunyai hak suara. Namun demikian, ternyata keributan terjadi lagi. Hal ini dipicu karena pada saat akan dilangsungkan pemasukan suara, terjadi lagi kesalahan interpretasi mengenai hak suara bagi UKM. Ada pihak yang menginginkan bahwa yang memberikan suara adalah ketua UKM itu sendiri, bukan ketua komisi suatu bidang dalam UKM itu atau orang-orang yang mendapat mandat dari ketua UKM. Masalah ini mendapat perdebatan yang sangat keras. Masing-masing mempertahankan prinsipnya. Akibatnya Novian selaku ketua panitia mengancam mengundurkan diri dari jabatannya jika masalah ini tidak segera diselesaikan oleh para pengurus Forkom UI. Akhirnya setelah mengalami debat yang lama masalah ini dapat diselesaikan. Proses pemilihan ketua harian SMUI pun dimulai.

¹¹² Wawancara dengan Kholid Novianto (Ketua BPM FS 1991 – 1992), 11 November 2008. Menurut Kholid, gaya retorika yang baik dari Bagus Hendraning ini dapat meyakinkan para anggota Forkom sehingga mereka tidak lagi mempermasalahkan latar belakang Chandra. Argumen Bagus dianggap objektif dan tidak ada motif pembelaan terhadap keanggotaan HMI Chandra mengingat Bagus sendiri notabene bukan anggota HMI.

Setelah melalui pertimbangan banyak hal, akhirnya Chandra M. Hamzah terpilih sebagai ketua harian SMUI mengalahkan Satya. Saat itu, pertimbangan Forkom UI yang menguntungkan Chandra karena kepribadiannya yang tenang dan mudah diterima di semua kalangan mahasiswa. Karakter seperti itu dinilai tepat dalam upaya untuk mengakarkan lembaga baru SMUI di tengah mahasiswa. Pertimbangan lainnya karena konsep SMUI yang dibawa Chandra cenderung lebih realistis daripada Satya. Konsep IKM yang ditawarkan Satya dianggap kurang relevan dengan kondisi saat itu yang sedang mengalami masa transisi dari NKK/BKK kepada SMPT, di mana perubahan lembaga kemahasiswaan baru saja dimulai.¹¹³

Dengan terpilihnya Chandra M. Hamzah sebagai ketua harian SMUI periode 1992 – 1993, rangkaian sidang pleno pun akhirnya selesai. Namun sebelum ketua umum SMUI menutup sidang, Ahmad Fikri selaku koordinator Forkom UI meminta waktu khusus untuk menyampaikan pengumuman penting. Pada kesempatan itu, Ahmad Fikri menyatakan bahwa dengan terpilihnya ketua umum dan ketua harian SMUI berarti keberadaan Forkom UI sudah tidak diperlukan lagi. Maka dengan itu, Ahmad Fikri atas nama seluruh anggota, secara resmi membubarkan Forkom UI.¹¹⁴

4.1.4 Terbentuknya SMUI dan Berakhirnya Forkom UI

Sejak terbentuknya SMUI dan ditetapkannya Firdaus Arthony sebagai ketua umum dan Chandra M. Hamzah sebagai ketua harian, maka secara otomatis kelembagaan Forkom UI telah berakhir dan fungsinya digantikan oleh SMUI. Namun demikian, eks-anggota Forkom UI yang notabene para Ketua SM-BPMF yang masih menjabat, tetap duduk dalam struktur kepemimpinan SMUI. Para ketua BPMF masuk ke dalam Dewan Presidium di bawah koordinasi ketua umum, sedangkan para ketua SM dan UKM masuk ke dalam tim pendamping di bawah koordinasi ketua harian. Memang pada saat itu SMUI dipecah dua, yakni ketua umum yang menjalankan fungsi legislatif dan ketua harian yang menjalankan fungsi eksekutif.

¹¹³ *Idem.*, Kholid Novianto.

¹¹⁴ *Idem.*, Kholid Novianto.

Mengenai keterlibatan para ketua lembaga SM-BPMF ke dalam struktur kepengurusan SMUI, mereka beralasan hal itu bagian dari bentuk tanggung jawab mereka untuk mengawal transisi lembaga kemahasiswaan. Walau bagaimanapun kehadiran lembaga baru (SMUI) tersebut tidak lepas dari jerih payah mereka sehingga wajar ada keinginan untuk turut mengelolanya. Namun yang terpenting bagi mereka adalah agar dalam perjalanannya SMUI tidak keluar dari kesepakatan yang tertuang dalam memorandum SMUI.¹¹⁵

Untuk agenda jangka panjang, mereka berharap dengan bergantinya wadah pergerakan mahasiswa dari Forkom UI menjadi SMUI, organisasi ini dapat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar fungsi koordinasi. Dalam konteks ini, SMUI diharapkan dapat menjalankan fungsinya di dalam mengaktualisasikan aspirasi mahasiswa (fungsi kemahasiswaan), berperan di masyarakat (fungsi sosial), serta melahirkan aktivis-aktivis baru dalam gerakan mahasiswa (fungsi kaderisasi). Oleh karena itu, segera setelah SMUI terbentuk eks-anggota Forkom UI ini masuk ke dalam struktur kepengurusan guna merealisasikan harapan dan tujuannya itu. Hal tersebut juga terlihat pada isi memorandum di mana para ketua BPM-SMF masuk ke dalam struktur SMUI.

Setelah ditetapkan sebagai ketua harian SMUI, Chandra M. Hamzah kemudian mulai menyusun struktur kepengurusan. Mengenai jumlah personalia dan mekanisme perekrutannya menjadi kewenangan penuh ketua harian dengan konsultasi pada tim pendamping. Tahap selanjutnya ketua harian melakukan penjaringan nama-nama yang akan menempati posisi dalam kepengurusannya. Namun di luar struktur SMUI yang telah ditetapkan dalam memorandum, ketua harian menambahkan dua komisi dalam kepengurusannya, yaitu komisi seni dan komisi kerohanian. Alasannya mahasiswa butuh diapresiasi oleh SMUI dalam berkesenian dan dalam aktivitas keagamaan.

Pada 13 Februari 1992, Ketua Harian SMUI Chandra M. Hamzah dan Ketua Umum Firdaus Arthoni mengadakan pertemuan dengan seluruh ketua

¹¹⁵ *Ibid*, Kholid Novianto.

lembaga kemahasiswaan se-UI di sekretariat SMUI yang baru, yaitu di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa). Pertemuan tersebut untuk membicarakan penetapan struktur SMUI yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada 6 dan 10 Februari. Dalam pertemuan itu, mereka baru memutuskan para anggota pengurus SMUI untuk jabatan sekretaris umum dan biro-biro di bawahnya. Namun demikian, struktur pengurus SMUI baru dapat dilengkapi dengan jabatan untuk komisi-komisi pada pertemuan 13 Februari.¹¹⁶

Dengan telah terbentuknya kepengurusan SMUI, kemudian Rektor UI Prof. Dr. Sujudi mengeluarkan SK Rektor No. 126/SK/R/UI/1992, tentang Susunan Pengurus SMUI periode 1992 – 1993. SK tersebut ditetapkan pada Sabtu, 15 Februari 1992 dalam acara pengukuhan pengurus SMUI di Aula FK UI Salemba.¹¹⁷ Susunan Pengurus SMUI periode 1992 – 1993 yang dikukuhkan berdasarkan SK tersebut berjumlah 104 orang.¹¹⁸

Dengan dikeluarkannya SK pengesahan pengurus SMUI, maka sejak saat itu mahasiswa telah memiliki kembali lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas. SMUI sendiri secara resmi baru berhasil didirikan pada tahun 1992. Artinya bagi mahasiswa UI sendiri diperlukan waktu hampir dua tahun¹¹⁹ untuk memformulasikan lembaga SM UI yang dapat diterima tanpa terlalu jauh menyimpang dari SK 0457. Sementara di sisi lain, dengan terbentuknya SMUI, keberadaan Forkom UI sebagai wadah bersama secara otomatis dibubarkan sendiri oleh mahasiswa. Hal ini sekaligus mengakhiri kerinduan mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan yang dicita-citakan, terutama sejak Dema dibekukan oleh pemerintah tahun 1978. Melalui organisasi SMUI seolah Forkom UI mengalami transformasi menjadi SMUI. Kondisi ini diperkuat antara lain dengan keterlibatan Forkom UI dalam pembentukan SMUI dan bergabungnya sebagian besar aktivis Forkom UI ke dalam struktur kepengurusan.

¹¹⁶ Lihat *Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusan I (1992 – 1993)*.

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Terlampir. “Kepengurusan SM UI Periode 1992 – 1993”, dalam Majalah SUMA UI, Juni (Edisi Perdana) 1992., hlm. 11. Lihat juga *Notulensi Sidang-sidang SM UI Masa Kepengurusan I (1992 – 1993)*.

¹¹⁹ Sejak terbitnya SK.0457 28 Juli 1990 sampai dengan disahkannya SMUI pada 15 Februari 1992.